**KEARIFAN LOKAL SUKU SASAK SEBAGAI MODEL**

**PENGELOLAAN KONFLIK DI MASYARAKAT LOMBOK**

Muhammad Harfin Zuhdi

(Dosen Fakultas Syari’ah UIN Mataram.

Email: [harfin72@yahoo.co.id](mailto:harfin72@yahoo.co.id) & Hp. 0817897845)

**Abstrak**:

*Kearifan lokal sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung nilai kebijakan hidup, pandangan hidup, dan kearifan hidup. Kearifan lokal tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi juga bersifat lintas budaya yang dikenal sebagai konsep Bhineka Tunggal Ika yang di dalamnya terdapat ajaran hidup gotong royong, toleransi, kerja keras, dan saling menghormati. Kearifan lokal dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Dalam upaya rekonsiliasi terkait, diungkapkan bahwa ada keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam mendorong hadirnya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kearifan lokal. Kearifan local suku sask banyak ragam variannya, seperti tercermin dalam konsep krama, sesenggak.* *perteke*, atau *lelakaq*. *Kearifan lokal Sasak ini perlu direvitaliasi dan disosialisasikan secara sistematis dan sinergis oleh tokoh adat, tokoh agama dan pemangku kebijakan di wilayah supaya dapat fungsioanl sebagai model pengelolaan konflik di masyarakat Lombok.Pendekatan multikultural berbasis kearifan lokal ini merupakan model penting yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir konflik di wilayah ini.*

*Keywords: konflik, kearifan lokal suku Sasak, pendekatan multikultural, resolusi konflik*

**Pendahuluan**

Pulau Lombok didiami oleh sejumlah suku dengan budaya, agama, ras dan gologan yang berbeda. Perbedaan tersebut telah dapat bernilai positif bagi pengembangan masyarakat setempat namun juga mengandung nilai negatif, yakni dapat menjadi dasar pemicu terjadinya konflik. Kemajemukan tersebut merupakan suatu tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan kondisi daerah agar tetap aman dan tidak terjadi konflik yang dapat merugikan banyak pihak.

Selama ini pulau Lombok terkenal sebagai pulau yang aman dan nyaman untuk ditempati, sehingga menjadi primadona tujuan destinasi wisata nasional maupun internasional. Namun dalam dua dekade terakhir realitas harmoni Indonesia kerap terkoyak oleh serangkaian konflik berbau kekerasan yang marak merebak di berbagai daerah, termasuk di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.[[1]](#footnote-1) Selain meyebabkan jatuhnya korban jiwa yang tak sedikit, konflik juga mengakibatkan dampak sosial yang luar biasa. Berbagai konflik komunal ini bukan hanya sangat mengganggu stabilitas nasional tetapi juga mengancam integrasi bangsa. Inilah sebetulnya tantangan terberat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tersusun secara multikultur, multietnik, dan multiagama yang rapuh dan rentan jatuh dalam perpecahan, jika bangsa ini gagal mengelolanya secara baik.

Sebagai sebuah wilayah yang multi etnik, multi budaya, dan multi religi, pulau Lombok sangat rentan terhadap ancaman terjadinya konflik dengan beragam latar belakang, mulai konflik berbasis identitas, *etno comunal*, perebutan akses sumber daya alam hingga konflik berskala mikro seperti tawuran antar pemuda, sengketa antar penduduk dan sebagainya. Kesemuanya mengakibatkan terjadinya petaka bila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk kasus Nusa Tenggara Barat, fenomena konflik kekerasan telah menunjukkan intensitasnya, baik dalam bentuk konflik horizontal antar warga, konflik suatu golongan keagamaan dengan masyarakat sekitarnya, dan yang masih segar dalam ingatan masyarakat adalah apa yang terjadi di pesantren Umar bin Khattab (UBK) di Bima.[[2]](#footnote-2) Demikian juga, fenomena benih-benih paham keagamaan radikal dan potensi konflik komunal masih bercokol di sejumlah tempat di pulau Lombok, seperti konflik Monjok versus Karang Taliwang.

Lebih jauh dalam konteks kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama, jika dicermati pergerakannya meski di permukaan nampak rukun dan tenang, namun di bawah permukaan sesungguhnya terjadi persaingan dan perebutan pengaruh dan pengikut. Lebih jauh, konflik sosial akibat SARA telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat maupun pemerintah, dari sisi materiil yakni hancurnya infrastruktur yang ada dan hilang/rusaknya harta kekayaan. Lebih dari itu konflik juga berdampak pada sosio-psikologik dan sosio-kultural yang memprihatinkan bagi masyarakat dimana konflik terjadi. Konflik sosial tersebut telah menimbulkan depresi sosial, traumatik, keinginan balas dendam, dan menguatnya fenomena *social tention, cultural disintegration* dan rendahnya social trust terhadap pemerintah maupun terhadap kelompok masyarakat.[[3]](#footnote-3) Tentunya hal itu tidak diinginkan terulang kembali, oleh karenanya dibutuhkan suatu bentuk upaya preventif agar tidak terulang, serta penanganan permasalahan yang timbul dengan baik secara proporsional, terutama dengan pendekatan kearifan lokal.

**Kearifan Lokal Suku Sasak.**

Kedamaian dan harmoni sebetulnya merupakan kultur dominan masyarakat Sasak. Sejumlah idiom yang dikenal di lingkungan masyarakat Sasak sangat dekat dengan orientasi kedamaian. Konsep ajinin yang secara harfiah berarti saling menghormati, reme, rapah, regen yang berarti suka memberi, memilih situasi aman damai dan mendukung toleransi menambah khazanah kearifan lokal masyarakat Lombok dalam menjalani relasi sosial.[[4]](#footnote-4)

Sejak masa lampau etnis Sasak telah mengenal tentang wadah yang menjadi induk dalam kehidupan bermasyarakat mereka, yang mengatur tentang pedoman hidup warga masyarakat, dan tempat mereka mencari rujukan untuk menetapkan sanksi atas terjadi pelanggaran dalam tata pergaulan komunitasnya. Wadah itu dikenal dengan istilah *Krama*. Konsepsi ini teraktualisasikan atau terjabarkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak sejak masa lampau. Sehingga pelaksanaan dari konsepsi kultural itu telah menjelma menjadi berbagai elemen atau unsur yang tidak terpisahkan.

Secara konseptual, *krama* merupakan institusi adat yang memayungi kearifan lokal yang terdiri dari dua macam, yaitu *krama* sebagai lembaga adat dan krama sebagai aturan pergaulan sosial.[[5]](#footnote-5) Ajikrama terdiri dari kata *aji* yang berarti harga atau nilai dan *krama* yang berarti “suci dan terkadang berarti daerah atau kesatuan penduduk dalam suatu wilayah dalam suatu daerah adat”. Dengan demikian, *ajikrama* lambang adat, artinya nilai suci dari suatu strata sosial adat Sasak berdasarkan wilayah adatnya. *Krame* ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Krama* sebagai lembaga adat terdiri dari beberapa bagian antara lain:

1. *Krama banjar urip pati*, yaitu suatu kelompok adat atau perkumpulan masyarakat adat yang anggotanya terdiri atas penduduk di suatu kampung/dusun (dasan) atau berasal dari beberapa dasan, yang keanggotaannya berdasarkan dan mempunyai tujuan yang sama. Krama banjar lebih banyak bergerak pada banjar yang terkait urusan orang hidup dan orang yang mati. Jenisnya antara lain krama banjar subak, krama banjar merariq, krama banjar mate, dan krama banjar haji.
2. *Krama Gubuk*, yaitu bentuk krama adat yang beranggotakan seluruh masyarakat dalam suatu gubuk (dasan, dusun, kampung) tanpa kecuali. Keanggotaan krama tidak memandang bulu asalkan secara adat dan administratif yang bersangkutan adalah penduduk yang sah di dalam gubuk.
3. *Krama Desa,* yaitu majelis adat tingkat desa, terdiri dari Pemusungan (Kepala Desa Adat), Juru Arah (Pembantu Kepala Desa), Lang-Lang Desa (Kepala Keamanan Desa), Jaksa (Hakim Desa), Luput (Koordinator Kesejahteraan Desa), Kiai Penghulu.

2. Krama sebagai aturan pergaulan sosial terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. *Titi Krama,* merupakan adat yang diatur awig-awig sebagai hasil kesepakatan adat dari seluruh masyarakat adat. Jika dilanggar, dikenakan sanksi sosial atau sanksi moral seperti adat bejiran (bertetangga), adat nyangkok (menginap di rumah pacar).
2. *Bahasa Krama*, merupakan budi pekerti, sopan santun atau tata tertib adat yang diatur dalam *awig-awig* adat yang harus dilakukan dengan bahasa lisan dan bahasa tubuh yang santun dan tertib, dilakukan dengan penuh tertib-tapsila. Dalam bahasa krama terdapat beberapa kaidah dan tata bahasa yang termuat dalam kearifan lokal masyarakat Sasak, antara lain: tata bahasa, indit bahasa, rangin bahasa, paribahasa.
3. *Aji Krama*, merupakan harga adat komunitas atau juga harga status sosial seseorang atau nilai martabat kekerabatannya seseorang yang terkait dengan hak adat dalam komunitas, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat adat secara umum. *Aji krama* ini mencerminkan pengakuan terhadap status sosial sesorang dalam masyarakat.

Dari penerapan beberapa *Krama* dalam kehidupan etnis Sasak telah ikut mendorong lahirnya berbagai bentuk kearifan lokal dalam kumunitas tersebut, yang mengandung nilai-nilai yang masih cocok dalam konteks kekinian dan relevan diwariskan melalui pendidikan bagi peserta didik. Elaborasi berikut ini akan menyajikan pola-pola kearifan lokal yang dimaksud.

Selanjutnya secara umum terdapat tiga kategori bentuk kearifan lokal suku Sasak Lombok, yaitu: ***Pertama***, bidang politik, sosial, kemasyarakatan, tercermin dari sebelas macam “saling” sebagai pengikat tali silaturrahmi masyarakat Sasak, yaitu: (1) *saling jot/perasak* (sama-sama saling memberi atau mengantarkan makanan); (2) *saling pesilaq* (sama-sama saling undang untuk suatu hajatan keluarga); (3) *saling belangarin* (sma-sama saling layat jika ada kerabat/sahabat yang meninggal); (4) *saling ayoin* (sama-sama saling mengunjungi); (5) *saling ajinan* (sama-sama saling menghormati atau saling menghargai terhadap pebedaan, menghargai adanya kelebihan dan kekurangan yang dimilki oleh seseorang atau kelompok tertentu); (6) *saling jangoq* (sama-sama saling silaturrahmi, menjenguk jika ada di antara sahabat sedang mendapat atau mengalami musibah); (7) *saling bait* (sama-sama saling ambil-ambilan dalam adat perkawinan); (8) *saling wales/bales* (sama-sama saling balas silaturrahmi, kunjungan atau semu budi /kebaikan yang pernah terjadi karena kedekatan-persahabatan); (9) *saling tembung/sapak* (sama-sama saling tegur sapa jika bertemu atau bertatap muka antar seorang dengan orang lain dengan tidak membedakan suku atau agama); (10) *saling saduq* (sama-sama saling mempercayai dalam pergaulan dan persahabatan) terutama membangun *peranakan Sasak Jati* (persaudaraan Sasak sejati) di antara sesama *sanak* (saudara) Sasak dan antar orang Sasak dengan *batur luah* (non Sasak); dan (11) *saling ilingan/peringet* (sama-sama saling mengingatkan satu sama lain antara seseorang (kerabat/ sahabat) dengan setulus hati demi kebaikan dalam menjamin persaudaraan/silaturrahmi.[[6]](#footnote-6)

***Kedua***, bidang ekonomi perdagangan, tercermin dari tiga macam saling sebagai praktik kearifan lokal yaitu: saling peliwat (suatu bentuk menolong seseorang yang sedang pailit atau jatuh rugi dalam usaha dagangannya, saling liliq/gentik (suatu bentuk menolong kawan dengan membantu membayar hutang tanggungan sahabat atau kawan, dengan tidak memberatkannya dalam bentuk bunga atau ikatan lainnya yang mengikat), dan saling sangkul/sangkol/sangkon (saling menolong dengan memberikan bantuan material terhadap kawan yang sedang menerima musibah dalam usaha perdagangan).

***Ketiga***, bidang adat budaya tercermin dari *saling tulung* (bentuk tolong menolong dalam membajak menggaru sawah ladang para petani); *saling sero* (saling tolong dalam menanami sawah ladang); *saling saur alap* (saling tolong dalam mengolah sawah ladang, seperti dalam hal *ngekiskis*/membersihkan rerumputan dengan alat potong kikis atau *ngoma/ngome*/mencabuti rumput; dan *besesiru/besiru*, yaitu nilai kearifan lokal ini juga hampir sama dengan *saling saur alap*, yaitu pekerjaan gotong royong bekerja di sawah dari menanam bibit sampai panen.

Di samping ketiga katagori tersebut, ada juga nilai-nilai kearifan lokal dalam komunitas Sasak memiliki signifikansi nilai dan sangat cocok diterapkan dalam kehidupan saat ini maupun di masa akan datang, yaitu terdapat dalam ungkapan bahasa yang dipegang teguh dalam pergaulan sehari-hari dalam peribahasa dan pepatah sebagai perekat pergaulan masyarakat Sasak, yang dalam komunitas Sasak diistilahkan dengan sesenggak.*Sesenggak*, yaitu ungkapan bahasa (tradisional) yang berbentuk peribahasa dan pepatah sebagai perekat pergaulan masyarakat Sasak.

Dalam *sesenggak* banyak terkandung ajaran-ajaran dan nilai-nilai kearifan tradisional, seperti mengajarkan tentang Ketuhanan, pendidikan, moral, hukum dan sebagainya. Beberapa contohnya antara lain:

1. *Adeqte tao jauq aiq* (supaya kita dapat membawa air), maknanya bahwa dalam suatu perselisihan atau pertengkaran yang sedang terjadi dan memanas, maka kita harus mampu menjadi pendingin sebagai mediator .
2. *Besual/besiaq cara anak kemidi*, (bertengkar seperti cara cara pemain sandiwara), maknanya boleh saja kita berselisih pendapat, tetapi tidak boleh menyimpan dendam.
3. *Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau*, (air tetap jernih, teratai tetap utuh, ikan pun dapat ditangkap), maknanya adalah bahwa dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu perselisihan, diupayakan agar suasana tetap tenang, masyarakat tidak panik, lingkungan masyarakat tidak tertanggu, masalah atau perselisihan terselesaikan dengan damai.
4. *Banteng belage jerami rebaq*, (Banteng yang beradu di tengah-tengah sawah menyebabkan jerami rebah dan patah), maknanya adalah pertikaian yang terjadi pada dua orang pemimpin akan menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyatnya. Hal ini diumpamakan dengan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah sawah, jika diperhatikan, banteng, sapi, atau kerbau yang sedang beradu di tengah sawah yang baru selesai dipanen, maka keadaan jerami yang semula berdiri beraturan menjadi rubuh, jatuh tak tentu arah akibat pertarungan banteng tersebut. Demikianlah perumpamaan bagi pemimpin yang bertikai dan akibatnya bagi rakyat. Peribahasa ini ditujukan pada orang-orang berkedudukan baik dalam lingkup yang kecil maupun yang besar.

Berdasarkan uraian tentang kearifan lokal suku Sasak mulai dari masalah *krama* sampai dengan *sesenggak*, maka dapat dirumuskan dan disimpulkan bahwa “terdapat sepuluh unsur atau komponen nilai-nilai yang tercermin dalam kearifan lokal masyarakat Sasak, yaitu: (i) Keimanan kepada Allah; (ii) Sikap toleransi; (iii) Kerja sama dengan orang lain; (iv) Menghargai pendapat orang lain; (v) Memahami dan menerima kultur dalam masyarakat; (vi) Berpikir kritis dan sistematik; (vii) Penyelesaian konflik tanpa kekerasan; (viii) Kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif; (ix) Sensitif terhadap kesulitan orang lain; dan (x) Kemauan dan kemampuan berpartispasi dalam kehidupan sosial.[[7]](#footnote-7)

Dengan demkian, maka implementasi kearifan lokal suku Sasak yang sejak masa lampau mengandung nilai-nilai luhur dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan tetap memiliki relevansi dan signifikansi untuk dijadikan sebagai spirit nilai-nilai baru dalam konteks kekinian. Namun saat ini nilai-nilai kearifan tersebut telah mengalami pergeseran, kelenturan, bias dan seakan-akan kehilangan makna sesungguhnya. Kelunturan nilai-nilai itu terjadi karena adanya pengaruh kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi, serta laju pembangunan yang tidak didasarkan atas budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, generasi penerus dalam komunitas Sasak dewasa ini tidak lagi sepenuhnya mempedomani nilai-nilai tersebut, bahkan ada kecenderungan untuk ditinggalkan. Keadaan yang mengkhawatirkan itu menuntut adanya upaya revitalisasi nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan masyarakat Sasak dewasa ini, sehingga generasi muda tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Upaya ini akan efektif dilakukan melalui pendidikan, dan membangun kembali kesepakatan antar kelompok yang ada dalam komunitas Sasak itu sendiri secara sungguh-sungguh untuk merevitalisasi dan memformat kembali nilai-nilai luhur tersebut, menyesuaikannya dengan kehidupan masa kini dan dikemas dengan baik sebagai modal dan model untuk menghadapi tantangan masa depan. Transformasi nilai melalui pendidikan dan kesepakatan yang dibangun itu, hendaknya ditujukan untuk mengaplikasikan nilai-nilai luhur tersebut “dalam kehidupan bermasyarakat secara *teguq* (kuat dan utuh), *bender* atau *lornboq* (lurus dan jujur), patut (benar) tuhu (sungguh-sungguh) dan trasna (penuh rasa kasih atau kasih sayang).[[8]](#footnote-8)

Lebih jauh dalam usaha membangun kesepakatan dan memformat kembali nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para leluhur itu, hendaknya memperhatikan dan memahami bahwa “Kearifan lokal masyarakat Sasak diikat dengan *krama* dan *awig-awig* (lisan banjar gubuk/desa). Jadi, hidup bermasyarakat akan tetap harmonis, apabila lembaga adat ditopang *awig-awig* adat secara arif dapat direvitalisasi, dihidupkan, dirancang kembali, disesuaikan kebutuhan dan tuntutan masa kini.

**Model Pengelolaan Konflik Berbasis Kearifan Lokal**

Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar atau setting di mana konflik itu terjadi. Dengan demikian pendekatan yang umum sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik lokal, sehingga dibutuhkan model khusus. Pendekatan dalam penyelesaian konflik yang belum banyak dikaji tetapi sebenarnya telah lama berjalan adalah kearifan lokal (*local wisdom*).

Sebagaimana sudah dielaborasi bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai atau gagasan lokal setempat yang bersifat bijaksana, penuh kebaikan dan kemuliaan, yang tertanam secara mendalam dan diikuti oleh masyarakatnya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik.[[9]](#footnote-9)

Menurut Moendardjito, unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.[[10]](#footnote-10) Ketika banyak terjadi konflik, maka lahir berbagai teori tentang penyelesaian konflik. Hanya saja penerapannya tidak mudah karena berbagai faktor dan variabel yang beragam. Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia baik konflik vertikal maupun konflik horizontal telah menimbulkan kesengsaraan masyaraakat dan gangguan terhadap ketahanan bangsa dan Negara. Akibatnya cenderung melebar ke berbagai aspek kehidupan lainnya, di antaranya gejala pudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan rasa empati serta simpati.

Pola penyelesaian konflik memang kadang unik, sehingga model di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis banyak hal; tidak saja faktor global universal, tetapi perlu juga faktor lokal dan khusus. Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Penyelesaian yang ideal adalah jika dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat.

Tradisi dan kearifan lokal yang masih ada dan berlaku di masyarakat berpotensi untuk dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai. Hal itu karena kearifan tradisi lokal pada dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesamanya, lingkungan, dan Tuhan.[[11]](#footnote-11) Pendekatan kearifan lokal sangat tepat dalam menyelesaikan konflik karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat, juga masih memiliki nilai sakral dan tidak hanya berorientasi profan semata. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa selesai dan diterima secara damai oleh semua kelompok dalam waktu lama.

Selain argumen di atas, beberapa alasan lain pentingnya pendekatan kearifan lokal dalam mediasi konflik adalah karena kearifan lokal umumnya lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan dan sikap ketauladanan, dan bukan pada nilai-nilai individual. Penyelesaian dengan resolusi konflik secara damai tidak meninggalkan rasa dendam dan sakit hati berkepanjangan, tetapi membangun emosi persaudaraan, rasa, nurani dan kehormatan diri. Oleh karena diselesaikan dengan rasional, pelibatan emosi dan perasaan, maka penyelesaian bersifat tuntas dan dapat diterima semua pihak yang bertikai. Di sinilah resolusi konflik menawarkan kebersamaan atau sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) bagi yang bersengketa dan tidak merugikan satu pihak sementara pihak lain diuntungkan (*win-lose solution*).

Dalam konteks masyarakat suku Sasak di Lombok, Islam merupakan rujukan utama dan lensa ideologis dalam memahami dan mengevaluasi perubahan. Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghadapi perubahan serta kekuatan-kekuatan eksternal yang dirasakan sebagai ancaman terhadap kehidupan sosial mereka. Islam merupakan agama yang sangat dominan di pulau Lombok, yang memainkan peran penting sebagai penjaga nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

Pada masyarakat Sasak, kearifan lokal merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan agama dan adat budaya. Karenanya denyut nadi kehidupan masyarakat Sasak memerlukan cara-cara yang arif lagi bijaksana. Karena itu sikap yang etik yang dikembangkan masyarakat Sasak setidaknya juga tercermin dari petuah para orang tua yang dapat disimpulkan dalam ungkapan-ungkapan berikut: *Solah mum gaweq, solah eam daet, bayoq mum gaweq bayoq eam daet* (baik yang dikerjakan maka akan mendapat kebaikan dan buruk yang dikerjakan maka akan mendapatkan keburukan), *piliq buku ngawan, semet bulu mauq banteng, empak bau, aik meneng, tunjung tilah*. Masyarakat memahami bahwa seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh manusia dalam melanjutkan evolusinya, hingga mencapai tujuan penciptaan. Kehidupan mahluk-mahluk Tuhan saling terkait. Bila terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satunya, maka mahluk yang berada dalam lingkungan hidup akan ikut terganggu pula.

Berdasarkan aturan adat budaya ini, maka muncul budaya tradisional masyarakat Sasak yang tidak lepas dari pola trinitaris dasar yakni: *pertama*, “*epe-aik*” sebagai Pemilik yang Maha Kuasa atas segala asal kejadian alam dan manusia. *Kedua*, “*gumi-paer*” sebagai tanah tempat berpijak di situ langit dijunjung, karena di “*gumi-paer*” ini masyarakat Sasak dilahirkan, diberi kehidupan dan selanjutnya diwafatkan. *Ketiga*, “*budi-kaye*” yang merupakan kekayaan pribadi dari kesadaran akan “*budi-daye*” yang menurunkan “akal-budi” pada setiap diri manusia untuk mendapatkan kemuliaan hidup yang akan dibawa sampai meninggal dunia.

Ketiga hal inilah yang akan mewarnai setiap pandangan, ucapan dan perbuatan masyarakat Sasak menjadi adab budaya yang tidak hanya diukur dengan hasil karya secara material namun yang lebih penting adalah nilai-nilai yang diperoleh selama hidup yang tercermin dari pelaksanaan adat istiadat mereka.[[12]](#footnote-12)

Aspek kearifal lokal suku Sasak inilah yang perlu dielaborasi dan dieksplorasi secara komprehensif dan holistik sehingga tebentuk pola pemahaman tentang kearifan lokal terpadu, sinergi dan harmoni yang dimiliki masyarakat Sasak dalam hidup bermasyarakat sebagai model dalam mengeloala konflik yang melibatkan semua elemen masyarakat dan stake holder yang ada dalam masyarakat. Sementara itu fenomena maraknya konflik sosial yang terjadi di masyarakat suku Sasak, baik di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kota Mataram harus dilihat secara komprehensif, bahwa fenomena konflik saat ini memang melanda hampir semua etnis masyarakat di Indonesia. Hal ini menjadi fenomena umum, ketika saluran informasi dapat diakses secara massif, sehingga dapat membawa ekses kepada komunitas lain yang secara latah “ikut-ikutan” untuk mengekspresikan eksistensi identitas etnis atau kelompoknya.

Di samping itu, konflik juga dipicu oleh adanya ketimpangan sosial dan anomali moral dalam masyarakat, sehingga inilah faktor yang menyebabkan pada batas-batas tertentu tidak fungsionalnya kearifan lokal secara maksimal, sehingga perlu dilakukan upaya revitalisasi kearifan local dan rekacipta kearifan lokal baru (*institutional development*). Suatu rekacipta kearifan lokal baru, yang tepat guna untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi dan budaya serta politik masa kini di masyarakat.

Barangkali hal inilah yang perlu digali lebih luas dan mendalam, menyangkut pemahaman akan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat suku Sasak di Lombok, pemahaman tentang apa dan bagaimana bentuk kearifan lokal tersebut yang dapat dijadikan sebagai model dalam penanganan konflik dan bagaimana menumbuhkembangkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dengan kearifan lokal yang dimilikinya sebagai model pendekatan dan modal sosial dalam penanganan koflik melalui mediasi dan resolusi konflik secara sinergis, harmonis dan bisa membawa manfaat positif dari konflik tersebut, karena kearifan atau kebijaksanaan (wisdom) tersebut muncul disebabkan pengalaman atas apa yang selama ini terjadi dan dengan itu telah menjadikannya sebagai jawaban dan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

Sebagaimana diketahui bahwa kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, dan pepatah, maka fokus kajian ini tidak hanya pada kearifan lokal dalam bentuk aslinya saja, tetapi juga pada upaya masyarakat dalam melakukan rekacipta kearifan lokal baru (*institutional development*), yaitu “memperbaharui institusi-institusi lama yang pernah berfungsi baik” dan dalam upaya membangun tradisi, yaitu “membangun seperangkat institusi adat-istiadat yang pernah berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi-keagamaan tertentu pada suatu masa tertentu, yang terus menerus direvisi dan direka cipta ulang sesuai dengan perubahan kebutuhan sosial-ekonomi-keagamaan dalam masyarakat. Pengembangan institusi ini harus dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri, dengan melibatkan unsur pemerintah dan unsur non-pemerintah dengan kombinasi pedekatan *top-down* dan *bottom-up*.[[13]](#footnote-13)

Artikulasi kearifan lokal sebagai basis modal sosial untuk menegakkan kohesi sosial dalam masyarakat, karena ia merupakan sumber norma dari pranata sosial dan sebagai bagian dari unsur yang menginspirasi anggota masyarakat dalam mengkordinasikan diri untuk mewujudkan tujuan bersama.[[14]](#footnote-14) Oleh karenanya, ketika tujuan bersama tersebut disepakati pada tingkat lokal, maka ia menguatkan kohesi sosial pada tingkat lokal; bila tujuan bersama itu disepakati antar lintas lokal, maka ia menguatkan kohesi sosial lintas lokal; sedangkan bila tujuan bersama itu mencapai kesepakatan antara tingkat lokal dengan supra lokal, maka ia menguatkkan kohesi sosial vertikal.

Kohesi sosial yang kuat memiliki toleransi tinggi atas sensitivitas kesenjangan, ketidaksetaraan, eksklusivitas dan eksploitasi sebagai ladang bagi tersemainya konflik sosial dan tindakan kekerasan. Karena itu, tempatkanlah kearifan lokal sebagai modal sosial yang sama urgensinya dengan modal sumberdaya alam, modal kecerdasan dan kompetensi SDM, modal fisik sarana-prasarana, modal teknologi dan finansial, didalam tata kelola tatanan masyarakat. Dibalik preskripsi kearifan lokal secara informal; persentuhan multipihak pemerintah, *civil society*, dunia swasta, berbagai golongan dan lapisan masyarakat di dalam tatanan lokal, lintas horizontal tatanan lokal dan lintas vertikal tatanan lokal; menjadi niscaya untuk difasilitasi secara berkala. Fasilitasi itu hendaknya mengkondisikan dialog otentik antar pihak, dalam pertukaran pengetahuan dan persinggungan latar kelembagaan yang berbeda; guna mendorong relasi resiprosikal pewacanaan isu bersama, produksi dan reproduksi saling kepercayaan, serta penumbuh-kembangan jejaring multipihak.[[15]](#footnote-15)

Rekomendasi perlunya melibatkan “orang dalam” melalui kearifan lokal sebagai alternatif resolusi konflik sebetulnya bisa digunakan untuk kasus-kasus konflik bernuansa agama. Meskipun agama masih diperdebatkan sebagai unsur budaya atau bukan dalam konstruksi sosial masyarakat, tetapi fakta historis memperlihatkan bahwa proses integrasi dan harmoni di antara keyakinan yang berbeda yang pernah hidup di Indonesia dapat berlangsung justeru karena kontribusi kearifan lokal dalam merawat dan mengelola perbedaan tersebut.[[16]](#footnote-16) Hanya saja, berbagai kearifan lokal yang mungkin dikembangkan di negeri ini masih saja membutuhkan apresiasi dan penguatan dari para elit agar kearifan lokal ini bekerja (*workable*) secara baik. Para pemimpin tradisional adalah penggerak yang menentukan harmoni sosial pada suatu komunitas.

Dalam komunitas Sasak, sejumlah kearifan nilai lokal sejatinya dapat dikembangkan sebagai upaya mengelola konflik dan membangun harmoni. Nilai-nilai kearifan lokal bisa dilacak dari naskah kuno Kotaragama, *sesenggak* (peribahasa), *perteke*, atau *lelakaq* (pantun). Berikut ini diketengahkan beberapa pantun (*lelakaq*) kearifan lokal Sasak yang memiliki makna luhur dalam membangun harmoni kedamaian untuk meredam konflik dan mengingatkan tentang tujuan akhir kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia-akhirat. Hal ini tergambar dari pantun (*lelakaq*) Sasak berikut ini:

*Niniq Bai, Bije Sanaq Naken Bagus – bagus ntan jauq diriq endak langgar adat krama tertip tapsila endak piwal leq dengan towaq, pengelingsir leq pesware dengan si kwase silaq beriuk tunas ring arepan dekaji Allah Ta’ ale Neneq si Kuase ampoq te jari dengan besanakan si tao jauq diriq Saleh-solah-soloh, Patut-patuh-pacu genem geger gerasak Lombok Mirah Saksaq Adi, sekadi siq tesurat leq dalam kitab negare kerta game maliq perlu te pade iling, Sai-sai juaq si te ican jari perkanggo endaq jari dengan si besifat bahil loba tamaq beterus betabeat angkuh iri dengki dait sombong iling-iling-iling beriuk pade iling.*[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan pantun tersebut, tergambar bahwa kedamaian dan harmoni sebetulnya merupakan kultur dominan masyarakat Sasak. Sejumlah idiom yang dikenal di lingkungan masyarakat Sasak sangat dekat dengan orientasi kedamaian. Konsep *ajinin* yang secara harfiah berarti saling menghormati, *reme, rapah, regen*, yang berarti suka memberi, memilih situasi aman damai dan mendukung toleransi menambah khazanah kearifan lokal masyarakat Lombok dalam menajalani relasi sosial.[[18]](#footnote-18)

Selain terdapat sejumlah petuah lama yang menjadi nilai-nilai luhur yang mengatur interaksi sosial di Pulau Lombok terdapat pula banyak tradisi yang jika ditelusuri dapat menjadi bagian dari upaya bina damai (*peace building*). Tradisi-tradisi tersebut hingga kini masih dipraktikan di komunitas Sasak terutama di daerah pedesaan. Hampir keseluruhan tradisi ini mengarah pada upaya menjaga harmoni sosial. Seperti budaya *rowah* atau *begawe*, yang berarti pesta. Dalam banyak kesempatan *rowah* dilakukan pada upacara kelahiran, pernikahan hingga kematian serta aktivitas perayaan hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra’-mi’raj. Tradisi ini dilaksanakan dengan cara sebuah keluarga biasanya memasak makanan dan mengundang tetangga, teman, sanak sadara untuk makan bersama. Mereka secara kekeluargaan melakukannya dengan cara duduk bersila melingkar dan bersama-sama menyantap makanan yang dihidangkan, aktivitas ini biasanya disebut *begibung*.[[19]](#footnote-19)

Dalam *begibung*, semua orang duduk sejajar tanpa dibedakan status sosialnya. Mereka membaur menjadi satu dan dalam suasana penuh kekeluargaan.Meskipun sejumlah orang tokoh seperti tuan guru dan kiai biasanya memperoleh hidangan lebih awal ketimbang warga yang lain tetapi secara keseluruhan posisi mereka dalam proses begibung adalah sama. Menyantap nakanan tanpa menggunakan sendok, semua orang merasakan menu masakan yang sama sambil bercengkerama secara lepas. radisi ini jelas menggambarkan adanya kerukunan dan harmoni diantara warga. Semangat menjalin silaturahim sangat kental dalam kegiatan ini.

Praktek kearifan lokal Sasak dalam bentuk institusi *rowah* atau *begawe* ini merupakan institusi slametan yang berkaitan dengan kerukunan dalam kehidupan beragama. Kerukunan dan keselarasan menggunakan media *slametan* pada suku Sasak tercermin dalam slametan kelahiran anak, selametan kematian, slametan ibadah keagamaan seperti haji, slametan untuk menuntut ilmu dan rizki dan bermacam-macam bentuk slametan lainnya. Pada masyarakat suku Sasak jika dalam acara slametan ini maka tidak seorangpun merasa dibedakan dari orang lain.

Dengan adanya acara *slametan* masyarakat suku Sasak, maka akan dapat menciptakan hubungan yang harmonis, tanpa adanya jarak antara orang per orang dan kelompok dalam komunitas masyarakat. Namun demikian meskipun dengan adanya jarak dalam interaksi sosial kehidupan masyarakat suku Sasak --dan hal ini tidak dapat dipungkiri--, antara banyak varian namun dengan slametan akan tetap terjaga keharmonisannya. Dengan slametan ini masyarakat suku Sasak juga sadar dan tidak menutup mata jika kehidupan mereka memang berbeda dan mereka juga biasa memuji kepada orang-orang yang mampu menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan tercela.

Di luar falsafah hidup yang dapat digali dari kearifan lokal tersebut, pada beberapa desa di Lombok terdapat pula sejumlah aturan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat dan menjadi semacam hukum tak terlulis. Aturan yang disepakati bersama ini dinamakan *awig-awig*. *Awig-awig* ada yang tertulis ada yang tak tertulis. Dalam praktiknya *awig-awig* ini dapat lebih efektif dibanding hukum formal yang dikonstruk negara. Rumusan *awig-awig* yang bersumber dari masyarakat dan dirumuskan secara partisipatif, mendorong masyarkat dengan sukarela mentaati dan menjaganya. Jadi ketaatan yang muncul lebih karena kesadaran bukan paksaan.

**Revitalisasi Prinsip Nilai Kearifan Lokal Suku Sasak**

Untuk memahami nilai budaya suku Sasak secara komprehensif, maka dibutuhkan pengertian dan pemahaman terhadap makna dari setiap perangkat simbolnya. Perangkat simbol yang bermakna ini dapat ditemui dalam berbagai sumber, seperti, ungkapan dalam komunikasi sehari-hari, interaksi dan transaksi-transaksi adat, bait-bait pantun yang disebut “*lelakaq*” atau “*lawas*”, petuah para orang tua (*pengelingsir*) yang disebut “*wadi temah*”, dongeng-dongeng tradisional yang disebut “*waran*” atau “*tuaran*”, perumpamaan-perumpamaan yang disebut “*sesenggak*”, selain itu ada juga sumber-sumber tertulis seperti naskah-naskah kuno, seperti lontar, babad, dan sebagainya.

Salah satu naskah sebagai sumber tertulis yang perlu diketahui dan dibaca adalah “Naskah Lontar Kotaragama” yang berisi nilai-nilai luhur dan ajaran-ajaran tentang jati diri. Kotaragama terdiri dari dua kata yaitu “kotara” dan “gama”. Kotara berarti wilayah dan gama berarti aturan atau hukum. Jadi kotaragama berarti aturan atau hukum yang berlaku di suatu wilayah”.

Berikut ini dikemukakan beberapa prinsip kearifan lokal suku Sasak Lombok yang diadaptasi dari serangkaian pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan tokoh adat dan praktisi budaya Sasak.[[20]](#footnote-20) Dari sumber-sumber tersebut dapat dikemukakan beberapa prinsip dalam pengamalan nilai budaya lokal Suku Sasak yang terkandung dalam beberapa ungkapan simbolik yang kaya nilai-nilai kearifan lokal sebagai model dalam penyelesaian konflik.

Adapun prinsip-prinsip kearifan lokal suku Sasak dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prinsip Kejujuran dan Kesetian Memegang Janji.

Sifat tersebut di dalam Kotaragama disimbulkan dengan kata “*danta*” (gading gajah), “*danti*” (ludah), “*kusuma*” (bunga), “*warsa*” (hujan). Artinya, setiap kata-kata yang diucapkan atau janji-janji yang diikrarkan wajib dipegang dan dipertahankan dengan kuat bagaikan gading gajah yang apabila telah keluar tidak akan masuk lagi, jika berludah tidak akan dijilat kembali, bagaikan bunga yang tidak akan mekar dua kali dan hujan jika telah turun tidak akan kembali naik. Sehubungan dengan ungkapan tersebut, sebuah *sesenggak* dalam bahasa Sasak mengatakan :”*sampi betali isiq pepit, manuse betali isik raos*”, artinya, sapi diikat dengan seutas tali, sedangkan manusia diikat dengan kata-katanya.

2. Prinsip Dalam Kepemimpinan

Dalam Kotaragama diatur macam-macam sifat yang terpuji antara lain, rakyat tidak boleh “*nganut*” (sekehendak hati), “*sadu*” (mengambil hak orang lain), “*tahu*” (bersifat mendua), “*kawanten*” (menyebarkan aib pimpinan), “*jahil*” (memfitnah pemimpin). Sedangkan setiap pemimpin terhadap rakyat haruslah bersifat seperti :”*giri suci*” (bagaikan sebuah gunung yang suci dan anggun), “*surya*” (matahari yang menerangi orang sebumi), “*sasangka*” (bulan yang bersinar lembut dan tidak dinyalakan), “jaladri” (bagaikan laut, menampung segala aspirasi), “*bahni pawaka*”(bagaikan api, tidak gentar menghadapi kezaliman), “*nilatadu*” (bagaikan langit, tetap pada keagungan).Ungkapan simbolik dalam *sesenggak* suku Sasak mengatakan “*embe aning jarum, ito aning benang*”, artinya kemana arah jarum ke situ arah benang (rakyat taat kepada pemimpin yang adil), “*pancing udang lain dait pancing tune*”, artinya pancing udang, berbeda dengan pancing ikan tuna (pendekatan terhadap orang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan watak dan keadaannya), “*tumpu mandi isiq penyadu*”, artinya obat mujarab oleh kepercayaan (pemimpin harus mendapat kepercayaan dari rakyatnya).

3. Prinsip Dalam Menegakkan Ajaran Agama

Pengamalan hukum adat Sasak pada hakekatnya menghendaki setiap orang untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis baik antar sesama, hubungan dengan alam sekitar, semuanya harus dijalani dengan mengharapkan ridha dari Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Hal ini tercermin dalam ungkapan-ungkapan antara lain: “*Agama beteken lan betakaq adat*”, artinya agama bertiang dan berwadah adat (adat istiadat yang berlaku harus berfungsi menegakkan dan mensucikan agama), “*ndaq ta ngaken barak api*”, artinya jangan kita makan bara api (larangan untuk memakan riba), “*pacu-pacu punik akherat*”, artinya rajin-rajin mencetak akhirat (bersungguh-sungguh berbuat kebajikan), “*rurung bender, turne gantar*”, artinya jalan lurus lagi pula lebar (kesejahtraan dan ketentraman hidup karena menuruti ajaran agama).

4. Prinsip Kebersamaan dan Gotong Royong

Kearifan lokal Suku Sasak sangat menjunjung tinggi kebersamaan dalam menjalani kehidupannya baik di lingkungan keluarga, kerabat maupun di lingkungan yang lebih luas. Rasa kebersamaan diharapkan selalu menjiwai setiap individu dalam menjalani kehidupan bersama yang dalam aplikasinya antara lain tercermin dalam wujud kerja sama tanpa pamrih yang disebut gotong royong. Nilai kebersamaan dan gotong royong ini tercermin dalam berbagai ungkapan yang mengandung kearifan antara lain :“*Sorong jukung leq segara, bareng onyak bareng lenge*”, artinya dorong perahu di laut, bersama-sama baik bersama-sama buruk (jalankan hidup senasib dan sepenanggungan), “*Sipat anak empaq, tao pesopok diriq*”, artinya sipat anak ikan, bisa menyatukan diri (perselisihan dan perbantahan harus dihindari), ungkapan-ungkapat yang mengandung nilai kearifan dalam *lelakaq* Sasak, seperti “*beriuk*”, “*beriuk tinjal*”, artinya serempak, selangkah, seayun dalam bekerja, “*reme*”, artinya solidaritas dalam bekerja sama, “*siru*”, artinya saling berbalas dengan kebaikan.

5. Prinsip Persamaan dan Kebersamaan Hak

Persamaan hak mengandung arti harkat kemanusiaan setiap orang harus dihargai dalam wujud mengakui, menghormati dan menjalankan hak-hak yang dimilikinya. Hak-hak yang dimiliki, pada hakekatnya adalah titipan dari Sang Maha Pencipta, Allah SWT. Oleh karena itu setiap orang berupaya agar hak yang dimilikinya, terutama hak kebendaan harus dapat dinikmati orang lain. Prinsip ini terlihat pada berbagai aspek dalam kehidupan, seperti contoh dalam pengamalan hukum adat waris yang dikenal memiliki nilai-nilai kearifan antara lain: harta warisan yang disebut “pusaka” disimbolkan sebagai “tolang daeng papuq baloq”, artinya tulang rusuk nenek moyang (harta warisan itu meskipun “terbagi”, pada hakekatnya tetap dianggap “tidak terpisah”, dalam arti tetap dipandang sebagai “alat pemersatu”di kalangan para ahli waris). Harta warisan yang belum dibagi disebut “dowe tengaq”, artinya harta tengah (mengandung arti “hak dan kewajiban para ahli waris terhadap harta warisan adalah seimbang”. Artinya nilai warisan yang diterima ahli waris sebanding dengan tanggung jawab atau kewajiban yang melekat padanya. Harta warisan (pusaka) yang sudah terbagi tetap dipandang tidak terpisah, tercermin dalam ungkapan/istilah “*dowe sopoq*”, artinya harta yang satu (prinsipnya tetap saling terbuka untuk dinikmati bersama, dan setiap ahli waris tidak bebas untuk memperalihkannya kepada orang di luar ahli waris). Jual beli dalam lingkungan keluarga dan kerabat tidak dilarang, tetapi fungsi harta warisan yang menjadi obyek transaksi, tetap sebagai media pemersatu, tidak boleh diabaikan. Hal ini tercermin dalam ungkapan “nemu syarat kepeng”, artinya menerima warisan dengan syarat uang (dalam hal ini tidak dipergunakan istilah beli, hal ini mengandung makna untuk tidak menghilangkan mata rantai pewarisannya).

Dalam memiliki harta benda tidak boleh riya’ dan sombong, karena harta yang dimiliki, hakekatnya adalah milik Allah (“*dowen Neneq*”). Dalam pergaulan kemasyarakatan, orang Sasak tidak boleh menunjukkan keakuannya atas harta bendanya, hal ini tercermin dalam ungkapan “*dowen pelungguh saq leq tiang*”. Demikian pula dalam pergaulan antar sesama, sangat dijunjung tinggi falsafah *tindih, maliq, matiq*. Sikap perilaku ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur’an:

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

*”Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa) sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu selain Dia.”* (Al- Nisa': 86).

6. Prinsip Kemanusiaan

Martabat setiap orang harus dihargai dan dijunjung tinggi dalam arti setiap orang dijamin haknya untuk berkompetisi demi meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan lelakaq Sasak “*kaoq mondong jagung, sai tao jari agung*”, artinya kerbau memikul jagung, siapa bisa jadi terhormat (tanpa melihat asal usul dan simbol-simbol martabat individual, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk meraih sukses). “*ulah mandi isiq bisana*”, artinya ular bertuah karena bisanya atau racunnya (seseorang itu berharga atau berguna karena ilmunya).

7. Prinsip Pemeliharaan Lingkungan

Dalam pemeliharaan lingkungan, baik bersifat pisik maupun non pisik, kearifan lokal suku Sasak memberikan tuntunan yang sangat arif dan dilandasi keharusan bagi setiap orang untuk memiliki kesadaran yang tinggi. Pelaksanaan kewajiban tidak dikarenakan rasa takut terhadap penguasa, atau pemilik saja, tetapi lebih dilandasi atas rasa takut terhadap komunitas dan diatas segala-galanya adalah takut kepada Allah SWT.

8. Prinsip Dalam Perekonomian dan Etos Kerja

Setiap orang dituntut untuk selalu bekerja dengan penuh kesabaran dan keuletan. Setiap pekerjaan dilakukan dengan pertimbungan rasional. Demikian halnya dengan hasil yang dicapai tidak boleh dihambur-hamburkan. Dalam konteks ini ada beberapa nilai lokal yang berhubungan dengan prinsip ekonomi dan etos kerja tersebut, diantaranya : “*Kendeq teteh sie leq segara*”, artinya jangan buang garam di laut (ini mengandung makna larangan melakukan pekerjaan sia-sia). Di dalam bekerja, setiap orang dituntut untuk cekatan yang disebut “*kencak*” dan rajin yang disebut “*genem*”. Hasil yang diperoleh harus digunakan dengan hemat yang disebut “*itiq*” larangan berperilaku boros diungkapkan secara simbolik “*serut cina sampat besi*”, artinya serut cina sapu lidi besi (suka menghamburkan harta), karena perilaku hemat bisa menghantarkan orang menjadi kaya yang disebut “*tomot*”.

Apabila orang telah meraih kehidupan berkecukupan (*tomot*), tidak boleh kikir dan tamak tetapi harus dermawan yang disebut “*lome*”. Setiap resiko dalam pekerjaan harus dihadapi dengan sabar “*keduk lindung bani raok*”, artinya mencari belut berani kena lumpur (untuk mencapai tujuan dalam bekerja harus berani menanggung resiko). “*Mesang ima naenta, bawaq lanjaq batur*”, artinya ringankan tangan dan kaki kita, agar tempat nasi teman menjadi rendah (jika kita rajin, rezeki mudah didapat). Dalam mencari rezeki jangan sekali-kali memeras orang, “*Kendeq nenggala leq atas bongkor batur*”, artinya jangan membajak diatas punggung teman (larangan mengambil keuntungan dari jerih payah orang lain). “*nyuit isiq jaum*”, artinya menyungkil menggunakan jarum (ketekunan berusaha yang akhirnya membawa hasil). “*sorok dampuk, bosang boros*”, artinya sorok selalu menghasilkan, tetapi tempat penyimpanan bocor (ketidakmampuan mengatur penghasilan). “*tiwas karang jari apuh, manah tan keneng obah*”, artinya biarpun batu karang jadi kapur, hati tidak boleh berubah (mengandung makna, harus memiliki ketetapan hati dalam memberikan pengorbanan demi memperjuangkan cita-cita).

9. Prinsip Dalam Penyelesaian Konflik

Di dalam penyelesaian sengketa, kearifan lokal suku Sasak tidak menghendaki putusan kalah menang, akan tetapi harus mengarah kepada perdamaian yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dalam upaya penyelesaian itu, kedua belah pihak bisa saling menjaga perasaan masing-masing (*tao saling undur pasang*). Dalam konteks upaya penyelesaian konflik ini, nilai kearifan lokal suku Sasak tercermin dalam ungkapan-ungkapan antara lain: “*empaq bau, aiq meneng, tunjung tilah*”, artinya ikan tertangkap, air tetap jernih, bunga teratai tidak rusak, tetap utuh. Maksudnya, dalam penyelesaian konflik harus diorientasikan untuk menghasilkan kepuasan kedua belah pihak, kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah. “*adeq ta tao jauk aiq*”, artinya supaya kita bisa membawa air. Maksudnya, dalam suatu perselisihan, pertengkaran atau konflik yang memanas, kita mampu menjadi pendingin. “*sifat anak empaq tao pesopoq diriq*”, artinya sifat anak ikan bisa menyatukan diri. Maknanya adalah mengandung nasehat untuk selalu menghindari berbantahan satu sama lain. “*sikut tangkong leq awak mesaq*”, artinya ukur baju pada badan sendiri. Ungkapan ini mengandung makna bahwa segala perbuatan seseorang kepada orang lain, hendaknya diukur dengan ukuran pada diri sendiri.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kesembilan prinsip-prinsip nilai kearifan budaya tersebut sebagai bagian dari kearifan budaya lokal suku Sasak yang mempunyai nilai-nilai edukatif-psikologis dan etika-moral. Oleh karenanya, dalam konteks ini harus menjadi bagian yang harus direvitalisasi dan reaktualisasi serta diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga akan menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari upaya mengaktualisasikan kembali Lembaga *Krama Ad*at seperti; *Krama Banjar*, *Krama Gubuk* dan *Krama Desa*. Hal ini yang akan menjadi media dalam pelaksanaan dari *awig-awig* dan sanksi adat (*dedosan* ) yang terdapat dalam budaya lokal Sasak.

Beberapa prinsip nilai kearifal budaya lokal suku Sasak inilah yang perlu direvitalisasi dan dieksplorasi secara komprehensif dan holistic, sehingga tebentuk pola pemahaman tentang kearifan lokal terpadu, sinergi dan harmoni yang dimiliki masyarakat Sasak dalam hidup bermasyarakat sebagai model dalam mengelola konflik yang melibatkan semua elemen masyarakat dan stakeholder dalam masyarakat.

Oleh karenanya, dalam konteks revitalisasi kearifan lokal dibutuhkan dialog, yaitu sebuah dialog yang tidak hanya memunculkan kelebihan masing-masing sambil merendahkan nilai yang lain, tetapi sebuah dialog yang sanggup menciptakan ruang heteroglosia, bersuara majemuk. Dialog bukan hanya percakapan bahkan juga pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen bersama yang tujuannya agar setiap partisipan dapat belajar dari yang lain, sehingga dapat berubah dan berkembang. “Berubah” artinya dialog dilakukan secara terbuka, jujur dan simpatik dapat membawa pada kesepahaman (*mutual under standing*), sehingga segala prasangka, streotip, celaan, dan konflik dapat dieliminir. Selanjutnya dikatakan “tumbuh”, karena dialog mengantarkan setiap partisipan memperoleh informasi, klarifikasi dan semacamnya secara berimbang serta dapat mendiskusikannya secara terbuka dana tulus. Dialog merupakan pangkal pencerahan nurani dan akal pikiran (*tanwir al-qulub wa al-uqul*) menuju kematangan cara beragama yang menghargai yang lain (*the otherness*). Dengan demikian, paradigma dan sistem nilai sawa’ adalah menyangkut cara manusia melakukan perjumpaan dengan dan memahami diri sendiri dan dunia lain (*the others*) pada tingkat terdalam (*from within*), membuka kemungkinan-kemungkinan untuk menggali dan menggapai selaksa makna fundamental secara individual dan kolektif dengan berbagai dimensinya.[[21]](#footnote-21)

Berdasarkan elaborasi ini, maka dalam konteks revitalisasi kearifan lokal suku Sasak di masyarakat Lombok harus dilakukan upaya langkah-langkah invensi, inovasi dan dialog secara simultan dengan semua elemen dan *stakeholder* masyarakat sebagai upaya kreatif untuk menemukan, merekonsiliasi, dan mengkomunikasikan serta menghasilkan konstruksi-konstruksi baru sebagai model pengelolaan konflik.

Konstruksi tersebut tidak harus merupakan pembaruan secara menyeluruh atau kembali ke tradisi kearifan lokal masa lalu secara total, namun pembaruan yang dimaksud di sini adalah pembaruan terbatas sesuai dengan prinsip *al-’Adah Muhakkamah*. Jadi, sebuah invensi dalam konteks kearifan lokal tidak dimaksudkan menemukan tradisi kearifan lokal atau autentisitas secara literal, melainkan bagaimana tradisi-tradisi lokal itu menjadi sesuatu yang dapat berdialektika dan dimodifikasi ulang sesuai dengan konteks dimensi ruang dan waktu sesuai dengan kaidah: *Taghayyur al-Ahkâm bi at-Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwâl*. Kearifan lokal, dengan demikian merupakan proses yang tidak pernah berhenti mengupayakan berkurangnya ketegangan antara norma agama, kearifan lokal dan manifestasi budaya, termasuk merebaknya fenomena konflik di tengah masyarakat.[]

**Penutup**

Demikianlah elaborasi tentang kearifan lokal suku Sasak yang sarat dengan nilai-nilai yang baik dan sesuai dengan norma-norma agama yang selama ini diyakini secara teguh oleh masyarakat Sasak. Mengingat aturan-aturan dan norma-norma ini telah lama terinternalisasi di masyarakat sehingga penghargaan dan penerimaan sebuah keputusan akan bertahan lama. Karena sejatinya apa yang muncul dari hasil kesepakatan tersebut merupakan kehendak bersama masyarakat. Hal penting yang diperlukan adalah kesediaan dari para elit baik elit agama (Tuan Guru, kyai), elit pemerintah dan elit adat untuk duduk bersama mengembangkan pola bina damai berbasis kearifan lokal. Kesediaan para elit terhadap prakarsa bina damai ini penting mengingat meskipun sebuah daerah telah memiliki serangkaian nilai-nilai lokal dan mekanisme resolusi konflik, tetapi semuanya akan sulit berjalan tanpa keterlibatan elit secara aktif. Untuk itu diperlukan penguatan di tingkat elit agar nilai-nilai kearifan lokal dapat dikembangkan menjadi bagian dari upaya resolusi konflik dan prakarsa perdamaian di masa depan.

Potensi ini sangat mungkin dikembangkan tanpa harus bertabrakan dengan kaidah-kaidah Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Lombok. Karena dalam Islam sendiri konsep seperti *al-‘urf* atau *al-‘addah muhakkamah* merupakan konsep yang selama ini menjadi bagian dari sumber hukum. Pilihan penguatan dapat dilakukan dengan banyak cara sesuai kultur lokal. Mulai dari kegiatan *sangkep* (pertemuan, seminar), *gundem* (musyawarah) yang difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakati. Selebihnya dalam bidang pendidikan baik formal (sekolah, madrasah) maupun non-formal (pesantren), pengembangan kurikulum muatan lokal hendaknya memperhatikan kearifan lokal ini. Sebagaimana watak dari kearifan lokal sendiri yang merupakan sendimentasi dari proses dinamika masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Maka eksistensinya akan sangat tergantung dari kesediaan para aktor lokal dalam merawat dan mentransmisikan nilai-nilai tersebut dari generasi ke generasi. *Wallahu A’lam.*[]

**Daftar Pustaka**

Abdullah, Irwan, dkk (ed.)., *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa* (*local Genius*), (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986)

Arzaki, Jalaludin, http://www-putra-sasak.blogspot.com/2008/08/adat-daur-hidup-dalam-kearifan-lokal.html

Baidhawy, Zakiyuddin, *Membangun Sikap Multikulturalis perspektif Teologi Islam*, Makalah pada Halqah Tarjih: Menuju Muslim Berwawasan Multikultural, 2001.

Fukuyama, Francis, *The Great Disruption*: *Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*, (Yogyakarta: Qalam Press, 2002).

Ismail, *Wawasan Jatidiri dalam Pembangunan Daerah*, (Semarang: Effhar&Dahara Prize, 1990)

Ja’far, M., *Agama dan Pergeseran Refresentasi: Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia,* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009)

Kadri dkk., *Satu Leluhur Dua Agama*, Laporan Penelitian Lemlit IAIN Mataram, 2009.

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1993)

Marzali, Amri, dkk, *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, (Jakarta: INIS, 2003).

M. Ismail, Sukardi, dan Su’ud Surachman, “Pengembangan Model Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Sasak : Kearah Sikap dan Berprilaku Berdemokrasi Siswa SMP/MTs”, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, edisi 42, Nomor 2, Juli 2009

Sarjana, Agus, “Otokritik Islam dan Budaya Sasak Yang Mandul Mencegah Kekerasan” dalam Diskusi Publik “Peran Agama Dalam Mencari Solusi Kekerasan” 16 Februari 2004.

Sholahuddin, Marwan, “Mengenal Kearifan Lokal di Klepu Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik”

Sriyanto, Agus, *Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam Nusantara*, Jurnal Analisis, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012

Suprapto, *Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik*, Jurnal Wali Songo, Vol.21, No. 1, 2013.

Zada, Khamami, dkk., *Prakarsa Perdamaian: Pengalaman dari Berbagai Konflik Sosial*, (Jakarta: Lakpesdam NU, 2008)

Zuhdi, Muhammad Harfin, *Parokialitas Adat Wetu Telu: Dialektika Agama Lokal di Bayan Lombok*, (Mataram: Sanabi, 2015)

1. Selain kerusuhan Januari tahun 2000 yang terkenal dengan “kasus 171,” berbagai kerusuhan berbau kekerasan di Lombok, sering menghiasi media massa. Perang antar kampung seperti di Ketare Lombok Tengah dan Karang Genteng Kota Mataram adalah beberapa contoh kerusuhan massa yang hingga kini masih sering terjadi. Lihat, Khamami Zada dkk., *Prakarsa Perdamaian: Pengalaman dari Berbagai Konflik Sosial*, (Jakarta: Lakpesdam NU, 2008), h. 89-95. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lebih jauh tentang fenomena kekerasan karena faham radikalisme, lebih jauh, lihat. Yusuf Tantowi, “Mengurai Konflik Sunnah Vs Bid’ah di Pulau Seribu Masjid”, dalam Alamsyah M. Ja’far, *Agama dan Pergeseran Refresentasi: Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia,* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009), 27-63. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat kumpulan makalah “International Workshop on Ethno-Religious Conflicts in Indonesia Today” sebagaimana terbukukan dalam Amri Marzali, dkk, *Konflik Komunal di Indonesia Saat ini*, (Jakarta: INIS, 2003). [↑](#footnote-ref-3)
4. http://www.budpar.go.id/filedata/5199\_1443-5.keragamanbudaya1oke.pdf, diakses pada tangal 5 Desember 2010. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Ismail, Sukardi, dan Su’ud Surachman, “Pengembangan Model Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Sasak : Kearah Sikap dan Berprilaku Berdemokrasi Siswa SMP/MTs”, (Singaraja : Undiksha, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, edisi 42, Nomor 2, Juli 2009), h. 136-144. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara dengan tokoh adat suku Sasak, Jalaluddin Arzaki, 19 Oktober 2014; Bandingkan dengan M. Ismail, Sukardi, dan Su’ud Surachman, “Pengembangan.., h. 140. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara dengan tokoh adat suku Sasak, Jalaluddin Arzaki, 19 Oktober 2014. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Ismail, et.al., *Pengembangan*..h. 137 [↑](#footnote-ref-8)
9. Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1993), h. 31. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa* (*local Genius*) (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986) h. 40-41. [↑](#footnote-ref-10)
11. Agus Sriyanto, *Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam Nusantara*, Jurnal Analisis, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012 [↑](#footnote-ref-11)
12. Agus Sarjana, *Otokritik Islam dan Budaya Sasak Yang Mandul Mencegah Kekerasan,* dalam Diskusi Publik “Peran Agama Dalam Mencari Solusi Kekerasan” Praya, 16 Februari 2004. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ismail, *Wawasan Jatidiri dalam Pembangunan Daerah*, (Semarang: Effhar dan Dahara Prize, 1990), 198 [↑](#footnote-ref-13)
14. Francis Fukuyama, *The Great Disruption*: *Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*, (Yogyakarta: Qalam Press, 2002). [↑](#footnote-ref-14)
15. Darmawan salman, Dapatkah Kearifan Lokal Fungsional Dalam Pengelolaan Konflik di Tengah Preskripsi Global?, lihat http://alwyrachman.blogspot.com/2011/04/dapatkah-kearifan-lokal-fungsional.html, diakses tanggal 15 Oktober 2014 [↑](#footnote-ref-15)
16. Berbagai penelitian menunjukan akan efektivitas kearifan lokal dalam merawat pluralitas beragama. Penelitian yang dilakukan Kadri dkk, tentang harmoni sosial antara pemeluk agama Kristen dan Islam yang terjadi di masyarakat Donggo, Kabupaten Bima dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan tradisi leluhur. Selengkapnya baca, Kadri dkk., “Satu Leluhur Dua Agama,” Laporan penelitian Lemlit IAIN Mataram 2009. Demikian juga kerukunan yang terjalin antara warga Muslim dan Kristen yang ada di Klepu Ponorogo juga disatukan oleh kearifan Lokal setempat. Lihat, Marwan Sholahuddin, “Mengenal Kearifan Lokal di Klepu Ponorogo: Praktik Hubungan Sosial Lintas Agama dan Mekanisme Pencegahan Konflik” dalam Irwan Abdullah, dkk (ed.)., Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 13-48. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jalaludin Arzaki, http://www-putra-sasak.blogspot.com/2008/08/adat-daur-hidup-dalam-kearifan-lokal.html diakses tanggal 15 Oktober 2014, dan wawancara dengan Jalaludin Arzaki. [↑](#footnote-ref-17)
18. http://www.budpar.go.id/filedata/5199\_1443-5.keragamanbudaya1oke.pdf, diakses pada tangal 14 Oktober 2014. [↑](#footnote-ref-18)
19. ` Suprapto, *Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik*, Jurnal Wali Songo, Vol.21, No. 1, 2013. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wawancara mendalam dilakakukan dalam beberapa kesempatan dengan bebrapa tokoh adat dan praktisi-pengamat budaya, seperti, Lalu Jalaluddin Arzaki, Lalu Mudjitahid, Lalu Bayu Windia, Dr. H. Husni Muadz, H. Lalu Sapruddin, dan Lalu Satriawangsa. [↑](#footnote-ref-20)
21. Zakiyuddin Baidhawy, *Membangun Sikap Multikulturalis perspektif Teologi Islam*, Makalah pada Halqah Tarjih: Menuju Muslim Berwawasan Multikultural, 2001. [↑](#footnote-ref-21)